

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abror, H. Khoirul. (2020). *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Yogyakarta: Ladang Kata.
- Ali, H. Zainuddin. (2017). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, H. Zainuddin. (2022). *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- As-Subki, A.Y. (2010). *Fiqih Keluarga*. Jakarta: Amzah.
- Cahyani, T. D. (2020). *Hukum Perkawinan (Vol. 1)*. Malang: UMM Press.
- Dahwadin, S. S., Somantri, M. D., Syaripudin, E. I., dan Sunarsa, H. S. (2019). *Perceraian dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. Wonosobo: Penerbit Mangku Bumi.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group.
- Farida, E., Haidlor A.A., Sumarsih A., Abdul M., dan Muh. A. S. (2007). *Perempuan dalam Sistem Perkawinan dan Perceraian di Berbagai Komunita Adat*. Jakarta Timur: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta.
- Ghazaly, H. A. R. (2019). *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Imron, Ali. (2015). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. I, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya.
- Jahar, A. S. (2013). *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Kamal, Abu Malik. (2007). *Fikih Sunnah Wanita*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Kbbi, K. B. B. I. (2016). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Kementerian Pendidikan dan Budaya.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2018). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Bima Islam.
- Kharlie, A.T. (2013). *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mardani. (2011). *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Marzuki, Peter Mahmud. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Prawirohadmidjojo, R.S. dan Marthalena Pohan. (2008). *Hukum Orang dan Keluarga (Personen En Familie-Racht)*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Rofiq, Ahmad. (2015). *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rajawali Press.
- Rokhim, N. (2015). *Bila Mampu, Menikahlah! Bila Tidak, Berpuasalah!: Karena Rasulullah Tak Asal Menikah*. Yogyakarta: Diva Press.
- Soekanto, Soejono, dan Mamudji, S. (2011). *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Ke-13. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunggono, B. (2013). *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan ke-14. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Syarifuddin, Amir. (2009). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup.
- Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan. (2014). *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Waluyo, Bambang. (2008). *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zein, Satria Effendi M. (2004). *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*. Jakarta: Kencana.

JURNAL PENELITIAN HUKUM

- Amiriyah, N. (2015). Nafkah Madliyah Anak Pasca Perceraian: Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 608/K/AG/2003. *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah*, 6(1), 1-15.
- Annas, S. (2017). Masa Pembayaran Beban Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam Perkara Cerai Talak (Sebuah Implementasi Hukum Acara di Pengadilan Agama). *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 10(1).
- Azizah, L. (2012). Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam. *Al-Adalah*, 10(2).

- Fakhria, S. (2014). Konsep Talak: Versus Situs [www. darussalaf. or. id](http://www.darussalaf.or.id) dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(1).
- Fatmawati, F. (2017). Kewenangan Peradilan Agama dalam Memutus Perkara Perceraian Akibat Murtad. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2(1), 26-33.
- Heniyatun, H., & Anisah, S. (2020). Pemberian Mut'ah dan Nafkah Iddah dalam Perkara Cerai Gugat. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 21(1).
- Hidayat, S. (2018). Pemenuhan Nafkah Mut'ah, Iddah, dan Madiyah Istri Sebagai Syarat Penjatuhan Talak Dalam Peradilan Agama Di Indonesia. *Tafâqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*, 6(2), 181-195.
- Hikmiah, H. H., & Faisol, A. (2022). Kewajiban Nafkah Mut'ah Qobla Al-dukhul Perspektif Teori Hukum Progresif Sajipto Rahardjo. *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum*, 10(2).
- Kalsum, U. (2019). Pertimbangan Hakim terhadap Nafkah Istri dalam Kasus Cerai Talak di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A. *Jurnal Yurisprudentie*, 6(2), 248-264.
- Khairuddin, K., Badri, B., & Auliyana, N. (2020). Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 01/Pdt. G/2019/MS. Aceh). *El-Ushrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 3(2), 164-189.
- Lubis, R. R. (2018). Penerapan Nafkah Mut'ah pada Perkara Cerai Talak Qobla Duhkul. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 3(2).
- Manna, N. S., Doriza, S., & Oktaviani, M. (2021). Cerai gugat: Telaah penyebab Perceraian pada Keluarga di Indonesia. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, 6(1).
- Mansari, M., & Moriyanti, M. (2019). Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Nafkah Isteri Pasca Perceraian. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 5(1), 43-58.
- Nasution, R. H. (2018). Talak menurut Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Al-Hadi*, 3(2).
- Putri, D. A. (2022). Analisis Perjanjian Taklik Talak dalam Perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]*, 2(1).
- Ramdani, R., & Syafithri, F. N. (2021). Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama. *Adliya, Bandung*, 15(1).

- Ruzaipah, R., Manan, A., & A'yun, Q. A. Y. (2021). Penetapan Usia Kedewasaan dalam Sistem Hukum di Indonesia. *Jurnal Mitsaqan Ghalizan*, 1(1), 1-20.
- Sanawiah, S., & Zainul, M. (2018). Batasan Kedewasaan dan Kecakapan Hukum menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 5(1), 1-12.
- Sururie, R.W. & Harry Y. (2018). Perceraian dalam Keluarga Muslim di Jawa Barat. *Jurnal Al-Manahij* XII, (2).
- Yulianti, D., Abikusna, R. A., & Shodikin, A. (2020). Pembebanan Mut'ah dan Nafkah 'Iddah pada Perkara Cerai Talak dengan Putusan Verstek. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 5(2), 286-297.

SKRIPSI

- Indrianti, F. (2018). *Tinjauan Hukum Tentang Perceraian antara Suami Isteri Qobla Al Dukhul (Sebelum Digauli) menurut Hukum Islam dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*. (Skripsi, Fakultas Hukum Unpas, 2018). Diakses dari: <http://repository.unpas.ac.id/36409/>.
- Marsela, R. (2019). *Tinjauan Konsep Masalah terhadap Nafkah Mut'ah: Analisis terhadap Ketentuan Nafkah Mut'ah dalam KHI Pasal 149a dan UU Pasal 41c No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. (Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019). Diakses dari: <https://digilib.uinsgd.ac.id/21932/>.
- Sholeha, A. (2019). *Analisis Masalah Pendapat Shams Ad-Din As-Sarakhsi dalam Kitab Al-Mabsut tentang Implikasi Hukum Cerai Qabla Al-Dukhul*. (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019). Diakses dari: http://digilib.uinsby.ac.id/31768/1/Aminatus%20Sholeha_%20C91215040.pdf.
- Yusti, S. F. (2019). *Analisis Hukum Islam terhadap Penafsiran Hakim Pengadilan Agama Surabaya tentang Istilah Qabla Al Dukhul pada Pasal 149 KHI dalam Perkara Perceraian*. (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019). Diakses dari: http://digilib.uinsby.ac.id/39071/1/Syifa%20Fauziah%20Yusti_C91215155.pdf.

WEBSITE

- Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo. "Website Resmi Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo". Tersedia pada link: <https://pariwisata.situbondokab.go.id> (online). Diakses pada tanggal 24 November 2022.

Pengadilan Agama Situbondo. “Website Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia: Pengadilan Agama Situbondo Kelas 1 A”. Tersedia pada link: <https://www.pa-situbondo.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi> (online). Diakses pada tanggal 24 November 2022.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1975, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050 Tahun 1975)

Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611)

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157)

Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186)

Putusan Pengadilan Agama Situbondo No.1518/Pdt.G/2020/PA.Sit.